



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI
SUB UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I DEWA GEDE PALGUNA**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **8007**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 10.180.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/189 m2 di GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di BADUNG, WARISAN Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 2.800 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di BANGLI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 760 m2 di KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 290.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ RS CVT MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR ACH1M21B04 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 53.173.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.827.221.237
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.306.387.200
Sub Total	Rp.	15.656.781.437
III. HUTANG	Rp.	141.666.666
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.515.114.771

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.